

BAB VI.
TONIC SECURITY INSTITUTION: PERAN GEREJA DALAM
MENYEDIAKAN KEAMANAN BAGI MASYARAKAT
TIMOR LESTE

Gereja telah memiliki peran penting dalam sejarah Timor Leste sejak abad ke-16. Peran gereja dapat dijelaskan dalam 3 periode waktu di mana pada setiap masanya, gereja memiliki peran yang berbeda. Periode pertama adalah di masa kolonial Portugal di mana Gereja menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan Portugal dan kemudian berubah jadi alat pembebasan menjelang tahun 1975. Kedua, adalah di masa pendudukan Indonesia di mana gereja berperan sebagai institusi yang memberikan perlindungan keamanan bagi para pejuang dan pemuda Timor Leste yang menentang pemerintah. Gereja juga menjalankan peran khas nya dalam mengkritik pemerintah Indonesia tanpa jalur kekerasan. Periode ketiga adalah di masa kemerdekaan di mana Gereja pada awal kemerdekaan dijauhkan dari peran sosial politik dan kemudian sejak tahun 2006 gereja berperan aktif dalam perubahan sosial dan pemenuhan rasa aman bagi masyarakat Timor Leste.

6.1. Sejarah dan Kekuatan Gereja di Timor Leste

Kehadiran gereja Katolik di Timor Leste pada masa kolonialisme Portugal telah dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal ini dapat dilacak melalui Undang-Undang Kolonial pasal 24 tahun 1930 di mana dinyatakan bahwa peran keagamaan sebagai “agen peradaban dan pengaruh sosial”. Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi Rezim Salazar untuk menandatangani *Concordat* (perjanjian) resmi dengan Vatikan pada tahun 1940. Melalui

Statuta Misionaris tahun 1941, *Concordat* memberi Gereja kontrol eksklusif atas pendidikan masyarakat adat di dalam Portugis koloni sebagai imbalan untuk mendukung ideologi kolonial Portugis. Dengan demikian, Gereja menjadi agen utama peradaban dan media untuk mengakulturasi elit Timor dengan budaya Portugis (Hodge, 2013; Leach, 2015).

Portugal telah membangun legitimasi kekuasaannya dengan mengkombinasikan agama Katolik dengan kepercayaan animisme masyarakat. Kekuasaan *Liurai* atau tokoh adat yang menjadi simbol penjaga kepercayaan animisme semakin diperkuat dengan kekuasaan spiritual agama. *Liurai* akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dengan cara mengakumulasi “lulik” (benda sakral sebagai sumber kekuatan) yang berasal dari tradisi dan “lulik” yang berasal dari gereja. Oleh karenanya, tidak jarang para *liurai* ini memberikan tanahnya kepada misionaris untuk dapat mendirikan kapel atau gereja.

Peran gereja di masa kolonialisme Portugal berubah setelah adanya Konsili Vatikan II. *Lumen Gentium* sebagai salah satu dokumen penting tentang gereja telah mendorong bagi persatuan gereja (ekumenis) bahkan dialog dan kerja sama dengan agama lain. Dokumen ini juga memberikan pemahaman bahwa pusat gereja tidak lagi di Roma atau Paus, tetapi Kristus di tengah-tengah umat dan Uskup sebagai gembalanya. Pemahaman ini mengindikasikan gereja di mana saja harus lebih memahami persoalan-persoalan umat di lingkungannya dan harus mampu memberikan solusi.

Konsili Vatikan II tersebut telah mengakibatkan Gereja semakin berusaha menjauhkan diri dari negara-negara kolonial. Gereja Timor Leste mulai untuk 'membudayakan' kegiatan

pastoralnya, dengan doa dan upacara pernikahan diterjemahkan ke dalam bahasa Tetun dan bahasa lokal lainnya, dan artikel Portugis untuk pertama kalinya pada akhir tahun 1960-an. Upaya ini semakin *massive* dilakukan setelah terjadi pergantian Uskup dari Ribeiro (Uskup Portugal) ke Martinho da Costa Lopes (Kelahiran Timor Leste) dan kemudian digantikan lagi oleh Uskup Carlos Belo. Gereja semakin menemukan kembali dirinya sebagai Gereja Rakyat dan menggemakan bahasa Konsili Vatikan II yang merujuk pada Gereja 'Umat Allah' (McGregor et al., 2012). Uskup Belo percaya bahwa : “iman Katolik adalah semacam simbol untuk menyatukan mereka, itu adalah cara untuk mengekspresikan fakta bahwa mereka adalah orang Timor” (McGregor et al., 2012).

Peran keamanan gereja mulai nampak ketika masa pendudukan Indonesia sejak tahun 1975 hingga 1999. Gereja adalah penyedia utama perlindungan bagi masyarakat yang melawan kekejaman Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selain itu, gereja juga menyuarakan protes-protes tanpa kekerasan dan mengkritik kebrutalan militer Indonesia. Meningkatnya peran gereja tersebut turut dipengaruhi oleh semakin jauhnya gereja di Timor Leste dari pengaruh gereja Portugal sehingga mereka semakin memperhatikan isu-isu lokal terutama permasalahan kemerdekaan Timor Leste.

Gereja adalah tempat aman bagi orang-orang Timor Leste untuk menyatukan masyarakat guna menentang pemerintah Indonesia. Orang-orang selalu menyanyikan penentangan mereka terhadap pendudukan selama kebaktian Gereja dan berdoa untuk keselamatan. Gereja digunakan sebagai tempat yang aman untuk kemerdekaan pejuang serta orang-orang terlantar yang takut akan penganiayaan tentara

Indonesia. Para pendeta akan membiarkan para demonstran tinggal di rumah mereka selama masa krisis sementara itu biara akan melindungi ribuan pengungsi lainnya (McGregor et al., 2012). Peran gereja sebagai tempat perlindungan di masa pendudukan Indonesia ini diperkuat oleh pernyataan salah satu jemaat gereja Katedral Dili : “Mahasiswa mencari perlindungan dari Uskup Belo (di sini kan pastoran uskup belo)...setelah penembakan santa Cruz, uskup Belo mendatangi Santa Cruz. Habis itu mahasiswa kembali berlindung di sini (Gerjea Katedral Dili)” (PS, 22/11/2018)

Gereja menjadi simbol protes untuk melawan kesewenang-wenangan pemerintah Indonesia. Peristiwa pembantaian di pemakaman Santa Cruz yang kemudian menarik perhatian Internasional bermula dari misa di Gereja Motael. Dalam keterangannya, seorang jemaat Gereja Katedral Dili menyampaikan bahwa : “tragedi Santa Cruz bermula dari misa arwah untuk Sebastiao Gomez. Setelah selesai para pemuda bergerak ke pemakaman (Santa Cruz) untuk tabur bunga. Tetapi di pemakaman sudah berkumpul militer dan menembaki para pemuda” (PS, 22/11/2018).

Peran keamanan Gereja didukung oleh fasilitas yang dimilikinya. Gereja adalah suatu lingkungan terpadu yang terdiri atas gereja paroki, biara bagi para pastor, saudara dan suster, rumah tinggal untuk anak-anak dan biasanya sebidang tanah untuk menanam makanan untuk dapur sekolah. Dari sini mereka dapat menyediakan makanan, pakaian, dan perawatan medis dasar, dan dukungan bagi para janda, korban fisik dan kekerasan seksual, dan anak yatim. Ruang aman ini sangat penting bagi perempuan mencari perlindungan dari kekerasan seksual, yang sering digunakan sebagai senjata perang oleh

militer Indonesia. Banyak kelompok agama, semacam itu sebagai Canossians dan Carmelite, mendirikan rumah penampungan khusus bagi gadis-gadis muda untuk membantu mereka melarikan diri dari ancaman pemerkosaan atau pulih itu. Perawatan holistik yang mereka tawarkan adalah spiritual dan fisiologis, yang semakin menarik iman orang untuk mengatasi penderitaan. (McGregor et al., 2012)

Gereja juga menjadi aktor yang menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Selaras dengan hal tersebut, Gereja juga merupakan aktor perdamaian dengan melakukan upaya dialog dan rekonsiliasi diantara orang-orang Timor Leste. Gereja menjadi salah satu bagian dari pergerakan kemerdekaan yang menggunakan jalur non kekerasan. Gereja untuk tetap menjaga pergerakan NGO, mahasiswa, partai politik, dan organisasi-organisasi HAM untuk tetap menjunjung tinggi HAM dan tidak melakukan pelanggaran HAM dalam menjalankan aksi penentangannya terhadap Indonesia. Gereja mendorong kaum muda untuk tidak mengangkat senjata dan bergabung kelompok gerilya dengan menyelenggarakan lokakarya tentang dialog dan rekonsiliasi. (McGregor et al., 2012)

Pada periode kemerdekaan, peran gereja dipinggirkan oleh PBB. PBB tidak memanfaatkan jaringan gereja yang telah ada untuk program-program reformasi yang mereka lakukan. Bahkan ketika kerusuhan tahun 1999, PBB hanya bisa menyelamatkan para staf UNAMET dan gagal memberikan perlindungan kepada para misionaris. (McGregor et al., 2012). Meskipun PBB menunjuk salah satu perwakilan gereja yaitu Romo Jovito dalam UNTAET, namun peran gereja tidaklah kuat dalam menjalankan pemerintahan. PBB mencoba untuk membedakan antara urusan gereja dengan negara.

Gereja semakin sulit terlibat dalam proses politik ketika Fretilin berkuasa dan Mari Alkatiri sebagai Perdana Menteri pada tahun 2002-2006. Ketika itu, Mari Alkatiri mengeluarkan kebijakan bahwa mata pelajaran agama tidak lagi wajib diajarkan di sekolah. Kebijakan ini memicu protes gereja dan berhasil menggerakkan masa untuk melakukan demonstrasi di depan parlemen selama 3 minggu. Alkatiri menuduh gereja dibalik penggulingannya pada tahun 2006.

Tidak sejalannya Gereja dengan Fretilin telah ada sejak Dom Ribeiro sebagai pemimpin Gereja sangat kritis terhadap Fretilin dan kecenderungan revolusioner di dalam partai dan kecenderungan ini semakin dipercepat oleh kembalinya Trotskis muda dan murid-murid Marxis dari Lisbon pada akhir 1974. Ribeiro bahkan memperingatkan Gereja agar melarang umat Katolik untuk memilih komunis atau sosialis, sebuah larangan yang ia ulangi di banyak homili berikutnya dan khotbah (Carey, 2007). Tindakan gereja ini mendapatkan balasan dari Fretilin dengan mengusulkan pemisahan penuh antara Gereja dan negara dengan merujuk pada apa yang terjadi di MPLA (*Movimento Popular de Libertacao de Angola*) di Angola dan FRELIMO (*Frente Revolucionaria de Libertacao de Mozambique*) di Mozambik. Dalam pandangan Fretilin, Gereja akan ditempatkan pada fungsi keagamaan saja seperti halnya kepercayaan tradisional atau agama-agama lain yang ada di Timor Leste.

6.2. Gereja sebagai Sumber Rasa Aman bagi Masyarakat Timor Leste

Peran gereja dalam memberikan rasa aman terhadap masyarakat dapat kita bedakan dalam upaya mengajarkan tentang nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, tindakan non

kekerasan, dan pembangunan manusia seutuhnya serta peran para pendeta dalam melakukan mediasi dan rekonsiliasi (Rev. Drew Christiansen, 2001). Peran pertama disebut sebagai peran *peace making* yaitu bagaimana gereja menanamkan nilai-nilai keamanan dan perdamaian kepada pengikutnya. Sedangkan peran kedua adalah *peace keeping*, yaitu bagaimana para pendeta membantu pengikutnya menyelesaikan konflik yang terjadi.

Agama telah menjadi sarana bagi para pengikutnya untuk melakukan transformasi ke kehidupan yang ideal. Agama yang terdiri atas simbol-simbol dan petunjuk-petunjuk yang saling terhubung, telah membentuk alam bawah sadar individu maupun kelompok dalam berperilaku sosial (Galtung, 1997; Said, A. A., & Funk, 2002). Dengan demikian, konsep konflik dan resolusi konflik melekat pada moralitas tertinggi dan prinsip-prinsip etik yang ada dalam agama dalam mendefinisikan konsep dan kondisi keamanan individu maupun harmoni sosial.

Uskup Belo memberikan suatu contoh bagaimana gereja dalam hal ini pendeta memainkan kedua peran tersebut. Uskup Belo selalu mengajarkan kepada pengikutnya untuk menghargai hak asasi manusia dan menjauhi perilaku kekerasan. Meskipun Dia memperjuangkan hak asasi manusia Timor Leste yang dilanggar oleh TNI, namun beliau tidak setuju dengan jalan kekerasan seperti yang dilakukan oleh para pejuang (Kohen, 1999).

Terlepas dari tidak terlibatnya gereja dalam proses politik dan reformasi yang dilakukan PBB di Timor Leste, ternyata gereja tetap menjalankan peran pentingnya dalam memberikan keamanan bagi masyarakat. Peran gereja dalam

menyampaikan pesan damai dan melakukan rekonsiliasi di masyarakat ditunjang oleh masih kuatnya keyakinan masyarakat Timor Leste akan peran norma agama dalam mendamaikan konflik. Ketika diberikan pernyataan tentang “saya merasa bahwa norma dan aturan agama membuat hidup saya damai dengan orang lain”, maka mayoritas responden menyatakan sangat setuju (52%) dan setuju (41%).

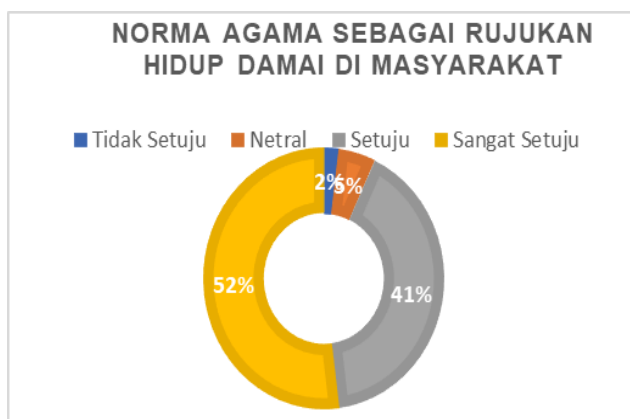


Diagram 6. 1 Pandangan Masyarakat terhadap Norma Agama sebagai Rujukan Hidup Damai di Masyarakat

Sumber: Olah data kuantitatif dengan SPSS

Fungsi norma agama dalam mendamaikan hidup penganutnya diperkuat dengan fakta bahwa 70% responden menyatakan sangat setuju dan 27% menyatakan setuju bahwa mereka mempercayai ajaran agama yang mereka anut.

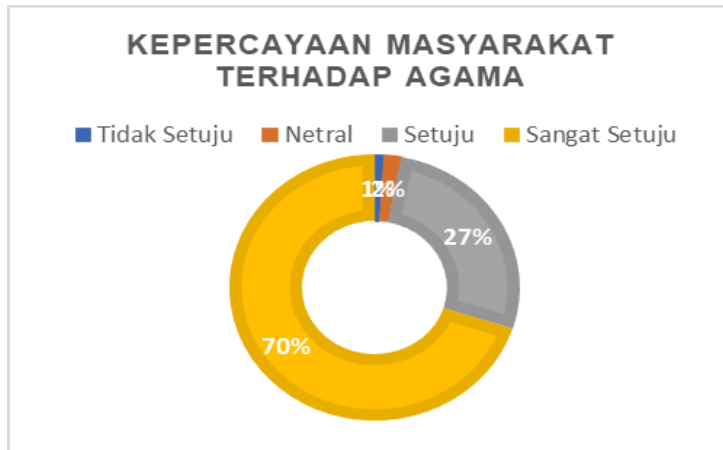


Diagram 6. 2 Keyakinan Masyarakat terhadap Agama

Sumber: Olah data kuantitatif dengan SPSS

Keyakinan ini mendorong mereka untuk mentaati norma agama yang mereka anut. Sebanyak 55 % responden menyatakan sangat taat dan 42 % menyatakan taat dalam menjalankan agamanya.

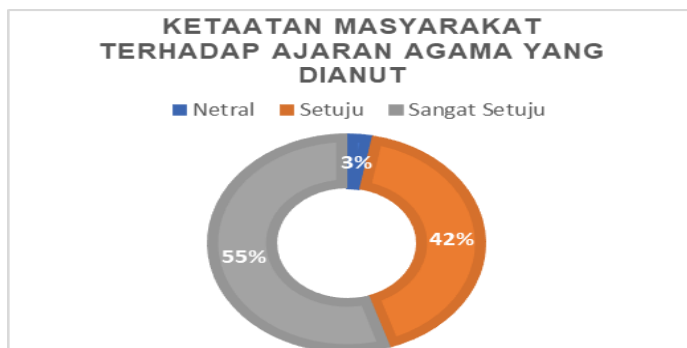


Diagram 6. 3 Ketaatan Masyarakat terhadap Ajaran Agama yang Dianut

Sumber: Olah data kuantitatif dengan SPSS

Kepercayaan masyarakat terhadap nilai dan norma agama Katolik yang mampu memberikan rasa aman dan damai telah terlembaga dengan baik. Gereja dan masyarakat telah mengajarkan nilai-nilai agama kepada keluarga mereka khususnya kepada anak-anak. Gereja telah memanfaatkan institusi pendidikan yang mereka miliki untuk mengajarkan agama kepada anak-anak didiknya. Sementara itu, keluarga juga melakukan pendidikan agama kepada anak-anaknya secara langsung maupun melalui sekolah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengajaran agama kepada keluarga dan anak-anak dapat dilihat dari diagram berikut ini.

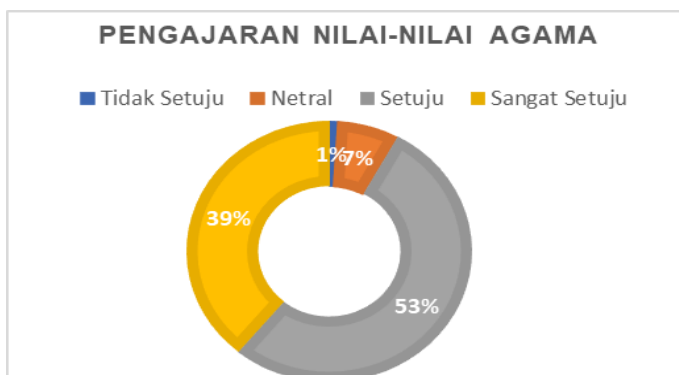


Diagram 6. 4 Pengajaran Nilai-Nilai Agama

Sumber: Olah data kuantitatif dengan SPSS

Berdasarkan pada diagram tersebut, ada 39% responden yang menyatakan sangat setuju dan 53% yang menyatakan setuju bahwa nilai-nilai agama mereka ajarkan secara turun temurun kepada anak-anaknya. Hal ini mengindikasikan bahwa, nilai dan norma agama katolik telah terlembaga dengan baik.

Penanaman rasa aman dalam kognisi rakyat Timor Leste dilakukan oleh gereja dengan memberikan harapan kedamaian dalam masa-masa krisis 1999 dan 2006-2008:

“Ketika tahun 1999 dan 2006 ketika Timor Leste pada masa krisis di mana rakyat banyak kehilangan nyawa, mengungsi dari tempat asal ke tempat lain, kelaparan di mana-mana. Di saat krusial seperti itu Dili memiliki gereja sebagai institusi non pemerintah yang secara masif mengembalikan harapan-harapan akan kedamaian dan ketentraman di tengah perasaan dan maut di Dili saat itu. Saya masih ingat sekali dalam khotbahnya Romo dalam Injil Yeremia bab 8 ayat 15 yang menyatakan bahwa “Percuma saja kita mengharapkan kedamaian dan masa kesembuhan sebab yang ada hanya kekerasan”. Dari Injil ini memberi kepercayaan diri orang Timor Leste untuk terus berbuat kebaikan walaupun dalam kondisi peperangan tahun 2006 itu” (PS/22/11/2018).

Kuatnya keyakinan masyarakat Timor Leste terhadap nilai dan norma agama telah berdampak pada efektifnya pesan-pesan damai yang disampaikan oleh para pastor untuk meredam konflik tahun 2006-2008. Narasumber yang sama menyatakan bahwa: “Krisis-krisis di Timor semenjak tahun 1999-2006, peran gereja itu salah satunya di hari minggu misa dan membacakan Evangelho⁷. Nah pastor-pastor dalam ekaristinya melakukan humili⁸ sesuai dengan Evangelho dan

⁷ Evangelho adalah inti bacaan yang diambil dari Alkitab yang dibacakan dalam setiap misa ekaristi pada hari minggu.

⁸ Humili adalah penjelasan dari pada pastor atas Evangelho yang dibacakan.

tentunya isi Evangelho itu disesuaikan dengan kondisi (konflik yang ada” (PS, 22/11/2018)

6.3. Mekanisme Resolusi Konflik dalam Aturan Gereja

Peran kedua gereja adalah *peace keeping* di mana gereja memberikan perlindungan terhadap aksi kekerasan dan menjadi konsiliator serta mediator konflik. Peran *peace keeping* ini dapat dirasakan oleh masyarakat Timor Leste sejak pendudukan Indonesia. Uskup Belo ketika itu memberikan perlindungan bagi para pemuda Timor Leste yang menentang TNI. Uskup Belo memberikan halaman gereja Dili kepada para pemuda yang lari dari tragedi Santa Cruz tahun 1991. Dengan fasilitas gereja, Uskup Belo memberikan bantuan pengobatan kepada korban dan menggunakan jaringan beliau untuk memintakan bantuan makan kepada para pengungsi. Beliau juga yang kemudian bisa menjadi pereda ketegangan dengan mengundang Gubernur Carascalao untuk menyaksikan penderitaan pengungsi (Kohen, 1999).

Gereja tetap menjadi tempat yang aman bagi masyarakat yang terkena dampak buruk dari kerusuhan pasca referendum dan konflik politik tahun 2006-2008. Dalam keterangannya seorang jemaat gereja menyatakan : “99 (tahun 1999 pasca referendum) juga ini (Gereja Katedral Dili) sebagai tempat pengungsian. Apalagi tahun 2006 itu penuh (pengungsi). Semua yang bukan merasakan sebagai seorang musuh atau korban itu ke sini...mereka campur” (PS, 22/11/2018).

Gereja sebagai tempat untuk mendapatkan perlindungan juga disampaikan oleh dua orang narasumber yang menjadi korban kerusuhan 2006-2008. Dua narasumber menyatakan

merasa lebih aman mengungsi di gereja dari pada di rumah. Mereka berkeyakinan bahwa gereja sebagai tempat suci tidak akan diserang oleh para perusuh. Selain itu, mereka juga semakin mudah untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan yang datang dari *Catholic Relief Service* dan lembaga-lembaga bantuan lainnya.

“Ketika 2006, Saya umur 7 tahun...Kami tinggal berbatasan dengan susteran Salesiana. Terus untuk menyelamatkan diri kami lari dengan membawa barang-barang kami dibantu oleh kakak kakak yang besar. Situasi kala itu tidak aman kala tinggal di rumah saja karena di tempat lain sudah bakar-bakar rumah. Kami tinggal di susteran untuk beberapa bulan. Terus pindah dari Selesiana ke Susteran Kanosiana. Tahun 2007 kami pindah dari Kanosiana ke rumah dibantu oleh *Catholic Relief Service*”. (ZGL, 29/11/2018)

Kita mengungsi lagi pas tembakan itu, tanggal 24 Mei 2006 tembak-tembakan. Kami mengungsi di sekolah-sekolah yang dekat Gereja Santo Josep. Orang-orang pergi ke Gereja, Sekolah, Seminari karena orang tidak akan masuk ke sana. Kita tinggal di tenda, kita tidak boleh ke rumah kita karena rumah kami sudah dibakar lagi sama orang-orang daerah sebelah saya (Kaikoli) yang ditinggali oleh kebanyakan orang *Loromonu*. Kita mengungsi lagi 2006, 2007 terus 2008 kembali lagi.” (CIAS, 29/11/2018).

Gereja sebagai tempat perlindungan ketika konflik terjadi dikonfirmasi oleh 25 % menyatakan sangat setuju , 48% responden yang menyatakan setuju, 22% menyatakan netral,

dan hanya 5% menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya akan kemampuan gereja dalam memberikan keamanan bagi mereka. Tidak hanya pada saat konflik 1999 dan 2006 saja, tetapi hingga tahun 2018 masyarakat tetap mempercayai gereja dapat menjadi tempat aman bagi mereka.

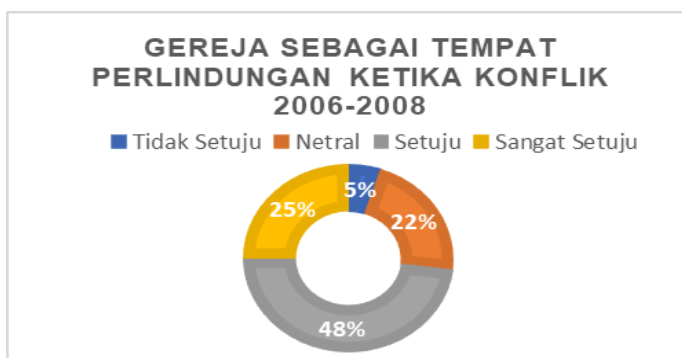


Diagram 6. 5 Pandangan Masyarakat terhadap Gereja sebagai Tempat Perlindungan ketika Konflik 2006-2008

Sumber: Olah data kuantitatif dengan SPSS

Gereja juga menjadi aktor yang mampu menciptakan perdamaian ketika konflik yang terjadi melibatkan masyarakat. Konflik tahun 2006 yang mengalami eskalasi hingga melibatkan orang-orang kaladi dan firaku mampu didamaikan oleh pihak gereja. Ketika tahun 2006-2008, para Romo selalu menyampaikan pesan-pesan damai untuk mengakhiri konflik komunal yang terjadi. "Uskup, mereka menghimbau tidak ada orang *Lorosa'e Loromonu*. Kita sama dihadapan Tuhan" (CIAS, 29/11/2018). Keyakinan masyarakat akan peran para pemimpin gereja tercermin dari 32% responden yang

menyatakan sangat setuju dan 43 % setuju tentang pentingnya peran pemimpin gereja dalam mendamaikan konflik tahun 2006-2008.

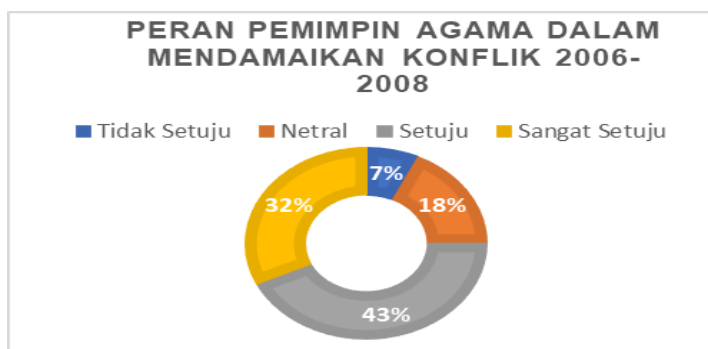


Diagram 6. 6 Pandangan Masyarakat tentang Pemimpin Agama dalam Mendamaikan Konflik 2006-2008

Sumber: Olah data kuantitatif dengan SPSS

Rekonsiliasi adalah pilihan yang dilakukan gereja untuk mendamaikan konflik 2006. Hal ini diakui oleh salah seorang jemaat gereja. Narasumber menyampaikan bahwa : “ setelah misa Natal, masyarakat *Lorosa’e* dan *Loromonu* yang berada di Gereja saling bersalaman dan berpelukan. Kami saling memaafkan dan tidak ada masalah lagi antara kami” (Anonim/25/11/2018). Pengalaman lainnya diceritakan oleh narasumber yang berbeda, di mana dia mengalami rekonsiliasi di lingkungan rumahnya setelah perayaan malam natal di kampungnya di Komoro. “Kami menyalakan lilin bersama dan kemudian saling berjabat tangan untuk maaf memaafkan” (PS/22/11/2018). Dalam konteks transformasi konflik pada level individu, pertobatan dan permintaan maaf dari pelaku memiliki efek psikologis dan dampak perubahan wacana pada

persepsi diri baik korban maupun pelaku menjadi saudara. Permintaan maaf juga berfungsi untuk membangun persatuan antara korban dan pelaku, suatu perubahan yang diinginkan dalam dimensi relasional transformasi konflik.

Peran gereja dalam penciptaan perdamaian dan rekonsiliasi diperkuat oleh fakta bahwa krisis sosial dan politik di masyarakat membuat mereka mempertanyakan kembali pesan damai dari Injil. Damai itu ketenangan yang mengalir dari tatanan yang benar. Ketika kita menempatkan tatanan yang benar ke dalam struktur masyarakat kita, ketenangan yang dihasilkan adalah kedamaian (Lederach, 1997). Gereja tidak hanya berperan dalam mentransformasikan pribadi, namun juga transformasi interaksi kontekstual dan destruktif menjadi keberadaan yang lebih kooperatif dan konstruktif.

Peranan gereja sebagai rekonsiliator konflik etnis juga kita temukan di Kenya. Selama konflik etnis pasca pemilihan umum 2008-2013, gereja di Kenya telah berhasil menggunakan cara-cara non kekerasan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Gereja Katholik di bawah kepemimpinan Rt. Reverend Cornelius Korir, berhasil membuat masyarakat mempercayai bahwa kekerasan adalah kejahatan dan harus dihindari. Gereja juga berhasil mempromosikan dialog di antara pihak-pihak yang berkonflik. Lebih jauh lagi, gereja mampu secara lebih luas menggunakan pendekatan pelengkap yang menargetkan beragam aspek kehidupan manusia untuk mencapai solusi jangka panjang bagi perdamaian (Nyongesa, 2014).

Keberhasilan gereja dalam rekonsiliasi konflik juga ditemukan di Mozambik. Gereja berhasil menciptakan satu komisi untuk dialog antara pemerintah, pihak-pihak lainnya,

dan RENAMO selaku kelompok oposisi bersenjata. Komisi dialog ini telah bekerja cukup panjang sejak tahun 1979 hingga akhirnya berhasil mencapai kesepakatan damai pada tahun 1997. Gereja melalui perayaan Ekaristi berhasil menjadikan *win-win solution* sebagai akhir dari konflik politik di Mozambique. Doktrin sosial gereja dapat sangat bermanfaat dalam memberantas akar penyebab konflik seperti yang di Guatemala. Gereja sebagai sakramen juga mampu menyatukan pihak-pihak yang berkonflik di Malawi antara tahun 2004-2008. Gereja juga berhasil menjalankan misi kenabian, yaitu agen keadilan, pengampunan dan rekonsiliasi sehingga mampu mengatasi dan mendorong rekonsiliasi melalui keadilan dan perdamaian (Mwangupili, 2008).

Meskipun Gereja di Timor Leste memiliki kesamaan peran dalam rekonsiliasi konflik, namun mereka memiliki kekhasan pada peran perlindungan terhadap korban konflik dan para pejuang. Dalam sejarahnya, Gereja di Timor Leste telah menjadi bagian dari perjuangan melawan Indonesia. Di masa konflikpun gereja memberikan tempat untuk pengungsian. Mereka dengan jaringan internasional juga menyediakan berbagai bantuan logistik dan kesehatan bagi masyarakat Timor Leste pada saat konflik 1999 maupun 2006-2008.

6.4. Gereja Memperkuat Peran Polisi dalam Melindungi Keamanan Masyarakat

Peneliti menemukan fakta bahwa gereja telah berperan penting selama masa perjuangan melawan pendudukan Indonesia. Gereja berfungsi sebagai perlindungan bagi para pemuda yang melakukan aksi demonstrasi melawan

pemerintah Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa Gereja menjadi sumber kekuatan pembebasan bagi masyarakat Timor Leste sekaligus menjadi tempat perlindungan bagi pemuda Timor Leste ketika masa perjuangan melawan Indonesia (Hodge, 2013). Gereja selalu menjalankan peran penting dalam perkembangan masyarakat Timor Leste (McGregor et al., 2012). Meskipun gereja tidak dilibatkan secara proporsional oleh PBB dalam pembentukan negara Timor Leste dan juga dijauhkan dari fungsi negara, namun gereja memilih untuk menjalankan fungsinya sendiri beriringan dengan fungsi negara (Carey, 2007).

Peran keamanan Gereja dapat kita lihat dari kemampuannya untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang keamanan. Gereja memiliki sumber rujukan keamanan yang berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan lah yang memiliki kekuasaan untuk menjadikan bencana atau kedamaian dalam hidup manusia. Melalui serangkaian nilai dan norma yang diatur dalam agama Katolik, umatnya diminta untuk taat guna mendapatkan keamanan dan kedamaian. Dengan tingkat ketaatan beragama yang masih tinggi di masyarakat Timor Leste, maka masyarakat pun menyandarkan perilaku hidup damai dengan bersumber pada ajaran-ajaran Katolik. Peran *peacemaking* ini selaras dengan pendapat Joseph V. Montville (2001) yang menyatakan bahwa ada jalinan antara agama dan psikologi massa, di mana keimanan dapat digunakan untuk mengintensifkan kekerasan dan peperangan atau memitigasi terhadap kekerasan dan mendorong terjadinya rekonsiliasi dan perdamaian antara kelompok dan negara dalam konflik (Montville, 2001).

Peran keamanan yang dirasakan oleh masyarakat adalah perlindungan dari tindak kekerasan. Hal ini dilakukan oleh Gereja dengan memberikan tempat dan pelayanan bagi para pengungsi akibat konflik tahun 1999 dan 2006-2008. Gereja mampu menyediakan tempat penampungan sekaligus logistik dengan didukung oleh jaringan kerja sama internasional dan kepercayaan masyarakat Timor Leste yang menganggap gereja adalah tempat suci yang harus bebas dari kekerasan. Gereja juga memerankan fungsi penyelesaian konflik dengan cara-cara mediasi dan rekonsiliasi pada saat konflik 2006-2008 di tingkat masyarakat. Pastor-pastor selalu menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan secara nyata bertindak sebagai rekonsiliator antara orang-orang *Loromonu* dan *Lorosa'e*. Gereja telah memanfaatkan momentum ibadah dan natal untuk dapat mendamaikan orang-orang *Lorosa'e* dan *Loromonu*.

Gereja-gereja di Timor Leste mampu berperan efektif dalam mendamaikan konflik 2006-2008 dan menjaga keamanan masyarakatnya. Keberhasilan ini ditopang oleh tiga hal, yaitu keberadaanya yang dipercayai oleh mayoritas penduduk Timor Leste yang beragama Katolik, posisi mereka yang tidak menjadi bagian dari konflik tersebut, dan tidak adanya relasi dengan negara. Tingginya kepercayaan masyarakat akan ajaran Katolik menyebabkan agama mampu menjadi pemasok teologi atau hermeneutika perdamaian bagi penganutnya dan memberikan kekuatan berupa kepercayaan yang tinggi bagi pastor untuk melakukan rekonsiliasi. Temuan ini memperkuat konsepsi tentang relasi agama dan perdamaian di mana selain sebagai bagian dari konflik, agama sebenarnya menjadi modal sosial untuk melakukan upaya-upaya *peacemaking* (Brewer et al., 2010).